

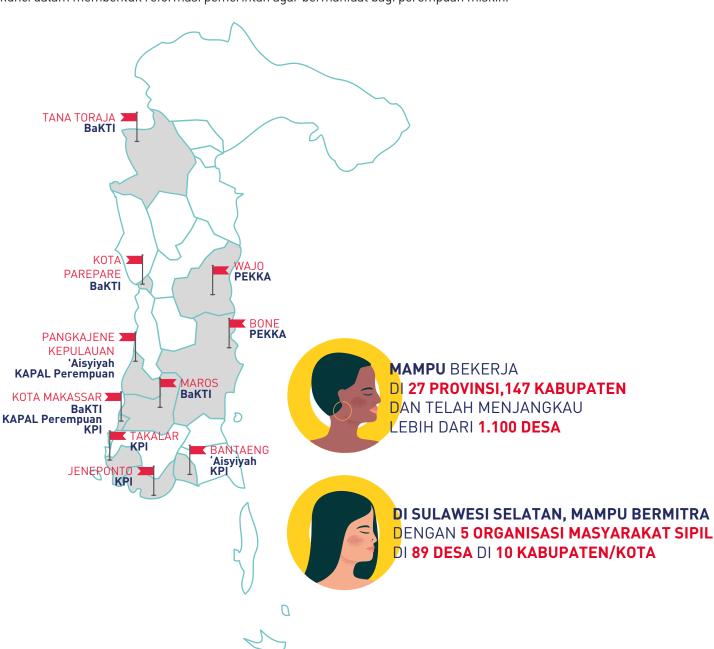




MAMPU di Sulawesi Selatan

Project Brief

MAMPU – Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan – adalah kemitraan antara Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS). MAMPU mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memberdayakan perempuan miskin dan meningkatkan akses mereka kepada program dan layanan pemerintah yang penting. MAMPU menjangkau perempuan yang termarjinalkan dengan bekerja bersama organisasi masyarakat sipil – Mitra MAMPU – untuk mengembangkan kemampuan kolektif perempuan dan memberdayakan mereka agar dapat mempengaruhi pembuatan keputusan dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Mitra MAMPU bekerja sama dengan rekan-rekan di pemerintahan, parlemen, dan sektor swasta dalam mengadvokasi perubahan di lima area tematik dengan mengembangkan pendekatan dan model yang menjanjikan. Pengaruh ini memainkan peranan kunci dalam membentuk reformasi pemerintah agar bermanfaat bagi perempuan miskin.



MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN KEPADA PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) telah mengembangkan pilot program bernama 'PIPA JKN' untuk memberikan informasi, menangani keluhan dan mengadvokasi peningkatan akses bagi perempuan miskin kepada perlindungan sosial, jaminan kesehatan nasional, dan berbagai layanan dan program pemerintah lainnya. Inisiatif ini dijalankan oleh para anggota kelompok perempuan yang disebut sebagai Balai Perempuan yang dibentuk di bawah MAMPU, dengan tujuan menguatkan pengorganisasian di komunitas serta kepemimpinan perempuan. KPI juga memiliki fokus khusus untuk mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk pelaksanaan UU Disabilitas (UU No.7/2016) dan akses kepada perlindungan sosial. MAMPU mendukung kerja KPI di 12 desa di 4 kabupaten di Sulawesi Selatan.



Salah satu tujuan kegiatan rutin Balai Perempuan adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam melakukan advokasi

Insitut KAPAL Perempuan (Lingkar Pendidikan Alternatif Perempuan), dan sub-mitranya, YKPM, menjalankan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan dan Inisiatif Sekolah Perempuan Informal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan perempuan miskin untuk berpartisipasi di dalam musrenbangdes (musyawaran perencanaan pembangunan desa) untuk mengadvokasi akses yang lebih baik kepada perlindungan sosial, jaminan kesehatan nasional, dan berbagai program lainnya. KAPAL juga melaksanakan *Gender Watch*, dengan membentuk tim monitoring untuk mengumpulkan data dan memantau akses perempuan kepada jaminan kesehatan nasional bagi kelompok miskin (JKN PBI). MAMPU mendukung kerja KAPAL di 4 desa di Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan.

PEKKA mendukung **kepala rumah tangga perempuan** melalui kelompok perempuan yang dibentuk di bawah MAMPU, untuk mengadvokasi kepada pemerintah daerah dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai peraturan untuk meningkatkan akses perempuan kepada layanan pemerintah, termasuk dokumen identitas hukum dan perlindungan sosial. Kerja ini didukung dengan inisiatif **'KLIK PEKKA'**, yaitu layanan konsultasi dan informasi jarak jauh (mobile) di desa-desa dampingan PEKKA. PEKKA juga mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inisiatif **'PEKKA Mart'**. MAMPU mendukung PEKKA di 28 desa di 2 kabupaten di Sulawesi Selatan.



MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN KE LAYANAN KESEHATAN DAN NUTRISI

'Aisy pe

Rumah Gizi yang digerakkan oleh anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) di Kab. Bantaeng. Hasil panen akan dikumpulkan untuk keluarga untuk meningkatkan kualitas asupan qizi

'Aisyiyah adalah sebuah organisasi massa perempuan Muslim yang membentuk kelompok perempuan (BSA) di bawah

> MAMPU sebagai pilot untuk Inisiatif 'Model Layanan' mereka. yang bertujuan meningkatkan akses perempuan dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan nutrisi di pusat-pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). 'Aisiyah juga menguji 'Rumah Gizi' sebagai tempat untuk memberikan pendidikan gizi dan ASI eksklusif. MAMPU mendukung 'Aisyiyah di 23 desa di 4 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kekerasan terhadap Perempuan - bekerja dengan anggota parlemen dan pemerintah

BaKTI bekerja melalui para sub-mitranya, yaitu YLP2EM Parepare dan YKS untuk melaksanakan inisiatif **Reses Partisipatif** mereka. Cara ini memudahkan **Kelompok Konstituen** yang dibentuk di bawah MAMPU, bersama-sama dengan anggota parlemen, pemerintah dan media, untuk mengadvokasi, menyusun (*drafting*) dan memonitor pelaksanaan peraturan untuk meningkatkan akses perempuan kepada berbagai layanan dasar, termasuk korban kekerasan. Di Maros, BaKTI bekerja sama erat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga berhasil meningkatkan layanan terkait penanganan kasus kekerasan (P2TP2A). BaKTI juga bekerja sama dengan pemerintah melalui **Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender** untuk mengkaji dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan. MAMPU mendukung BaKTI di 30 desa di Kabupaten Maros, Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan.





AKSI KOLEKTIF UNTUK TPB YANG BERPUSAT PADA PEREMPUAN DI SULAWESI SELATAN

KAPAL Perempuan memimpin lima Mitra MAMPU di Sulawesi Selatan dalam berkonsultasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), penyandang disabilitas, dan kelompok disabilitas dalam pelaksanaan SDG melalui rencana aksi pemerintah (RAD) yang responsif gender, inklusif dan transformatif. Isu-isu yang diangkat meliputi pengakhiran perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan akses kepada perlindungan sosial, dan mempromosikan toleransi dan keberagaman.



Para Mitra MAMPU di Sulawesi Selatan telah melibatkan 231.905 perempuan dan 53.927 laki-laki di dalam kegiatan-kegiatan berbasis komunitasnya sejak tahun 2016 hingga 2019.



Anggaran tahunan yang dialokasikan oleh Maros kepada **P2TP2A** telah meningkat drastis seiring dengan advokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh BaKTI, **dari nol pada 2016 menjadi 131 juta rupiah pada 2017**, serta peningkatan 17 persen pada anggaran **2018 menjadi 153 juta rupiah.**



Setidaknya ada 26 kebijakan daerah setempat yang berpihak pada perempuan dan anak-anak atas pengaruh Mitra MAMPU di Sulawesi Selatan, termasuk Peraturan Kota Parepare tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Peraturan Desa Millari di Bone untuk mengakhiri **perkawinan anak.**

(Source: MANIS Kita, November 2019)

Dulu, pemberdayaan perempuan hanya menjadi bagian kecil dalam Keluarga Berencana (KB). Baru sejak tahun 2016, berkat dukungan MAMPU-BaKTI, dinas ini didirikan dan terus maju sejak saat itu.

IDRUS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kabupaten Maros.

Ketika saya melihat ada tetangga di lingkungan saya yang anaknya sudah beranjak remaja, saya selalu mengatakan kepadanya, 'Jangan nikahkan dulu anakmu. Pikirkan masa depan mereka.' Saya sendiri harus menanggung dampak menikah muda sejak saya berumur 14 tahun hingga saat ini.

DHARMA

Anggota Sekolah Perempuan, Desa Mattiro Ulleng, Kabupaten Pangkep.

Kami juga melatih mereka untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat mereka sebagai perempuan. Sekarang, kami sudah lebih percaya diri. Sekolah Perempuan mengajarkan kami untuk berani bicara.

NURLINA

Nelayan perempuan, anggota Sekolah Perempuan di Pulau Sabangko, Kabupaten Pangkep.



INFORMASI:

